



KOMPETENSI SDM PADA PENYUSUNAN HPS MELALUI SIPASTI

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Kamis, 7 Agustus 2025

Disampaikan pada kegiatan Pelaksanaan PKB di Daerah, kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Pemprov Kalimantan Timur

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

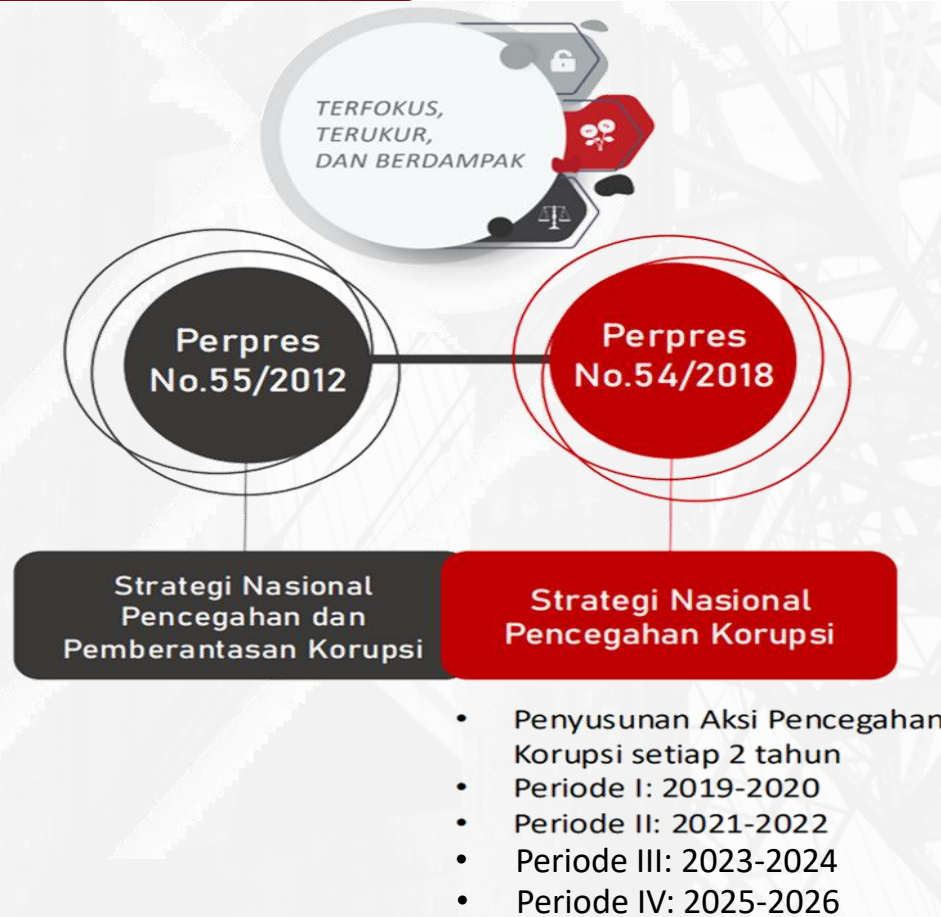
OUTLINE:

- 1. AKSI PENGADAAN BARANG & JASA STRANAS PK 2025 - 2026**
- 2. PENGEMBANGAN SIPASTI DI KEMENTERIAN PU**

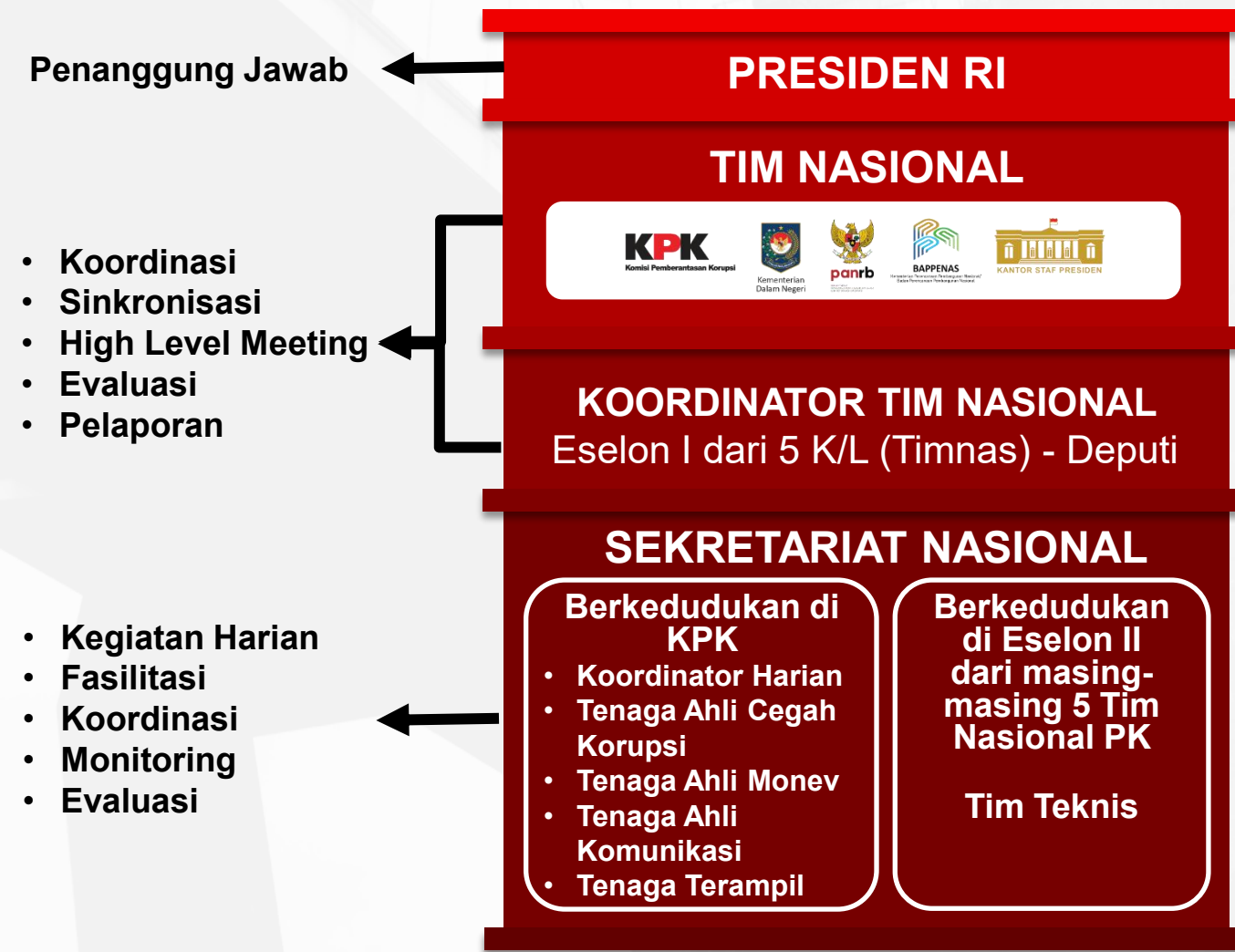
1

AKSI PENGADAAN BARANG DAN JASA STRANAS PK 2025-2026

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi



Strategi Nasional Pencegahan Korupsi



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Inspektorat Jenderal

Membantu urusan pelaksanaan aksi di daerah



KANTOR STAF PRESIDEN

Kedeputan Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM

Membantu sinkronisasi dan pengendalian program prioritas presiden



BAPPENAS
Kantor di Perencanaan Pembangunan Nasional

BAPPENAS

Kedeputan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Membantu urusan perencanaan pembangunan, termasuk rencana anggaran



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Kedeputan Pencegahan dan Monitoring

Mengonsolidasi upaya pencegahan korupsi



KEMENPANRB

Kedeputan Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan

Urusan aksi terkait kelembagaan dan SDM aparatur

Perpres 54 2018 Pasal 7 Ayat 5:

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan di Komisi Pemberantasan Korupsi.

15 Aksi Pencegahan Korupsi 2025-2026

FOKUS 1 Perizinan dan Tata Niaga



Aksi 1
Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tumpang Tindih Izin di Kawasan Hutan



Aksi 2
Penguatan Tata Kelola Impor



Aksi 3
Penguatan Integritas Pelaku Usaha



Aksi 4
Reformasi Tata Kelola Logistik Nasional



Aksi 5
Digitalisasi Layanan Publik

FOKUS 2 Keuangan Negara



Aksi 6
Perbaikan Kualitas Belanja Pemerintah melalui Optimalisasi Pemanfaatan SIPD RI



Aksi 7
Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang & Jasa



Aksi 8
Optimalisasi Penerimaan Negara (Pajak dan Non Pajak)



Aksi 9
Pencegahan Korupsi Berbasis NIK



Aksi 10
Penyelamatan Aset Negara



Aksi 11
Penguatan Integritas Partai Politik

FOKUS 3 Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi



Aksi 12
Penguatan Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)



Aksi 13
Perbaikan Sistem Penanganan Perkara Pajak



Aksi 14
Penguatan Sistem Penanganan Perkara Pidana dan Benturan Kepentingan



Aksi 15
Peningkatan Kerja Sama BUMN dan BUMD



Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang & Jasa (PBJ)

Latar Belakang:

- Anomali e-procurement
- SIPASTI belum terkoneksi SIPD (penetapan HPS Konstruksi)
- Pemanfaatan data BO belum optimal
- Implementasi E-audit oleh APIP belum maksimal

CAPAIAN AKSI HINGGA 2024



SIPASTI untuk HPS



E Katalog PBJ



Jumlah transaksi

2022 = 534.807
2023 = 1.866.461
2024 = 2.245.863



Jumlah Nominal Transaksi

2022 = Rp 83 T
2023 = Rp 188 T
2024 = Rp 246 T

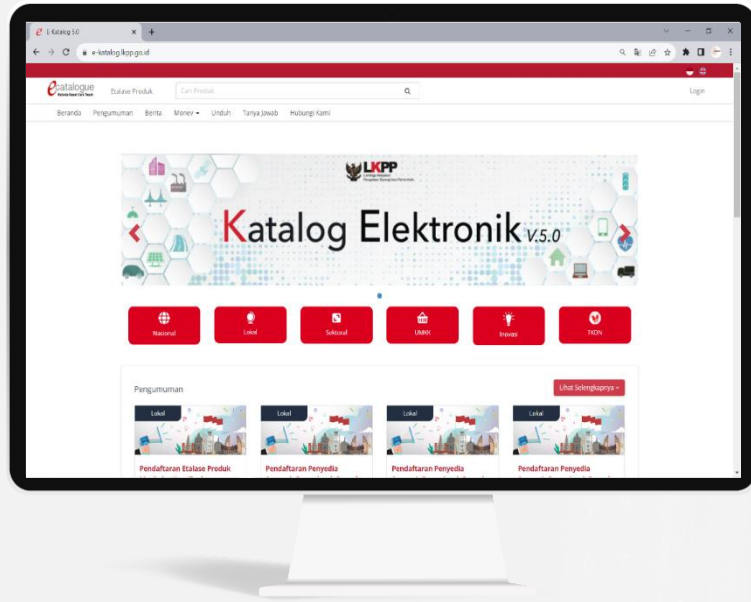
OUTPUT 2025-2026

- Tersedia notifikasi/peringatan dini atas potensi kecurangan pada sistem pengadaan
- Digunakannya sistem profiling pelaku usaha berbasis *beneficial ownership* (BO) dan penilaian kinerja pada *vendor management system* (VMS) dalam penetapan penyedia
- Optimalisasi sistem pembayaran dan sistem pengadaan elektronik
- Peningkatan kualitas harga perkiraan sendiri (HPS) konstruksi dengan perluasan implementasi SIPASTI

PELAKSANA AKSI

1. Kementerian Agama
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
3. **Kementerian Dalam Negeri**
4. Kementerian Hukum
5. Kementerian Lingkungan Hidup
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan
7. Kementerian Kesehatan
8. Kementerian Keuangan
9. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
10. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
11. **Kementerian Pekerjaan Umum**
12. Kementerian Perhubungan
13. Kementerian Perindustrian
14. Kementerian Pertanian
15. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
16. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
17. **Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**
18. **Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota**

Digitalisasi Pengadaan sebagai upaya pencegahan



• Implementasi E-Purchasing



Pemberdayaan
UMKM



Transparansi



Efisiensi



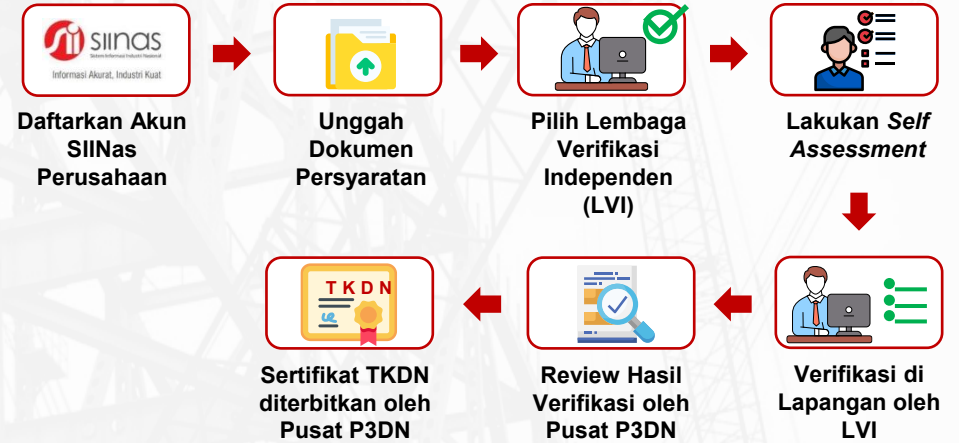
Inklusif



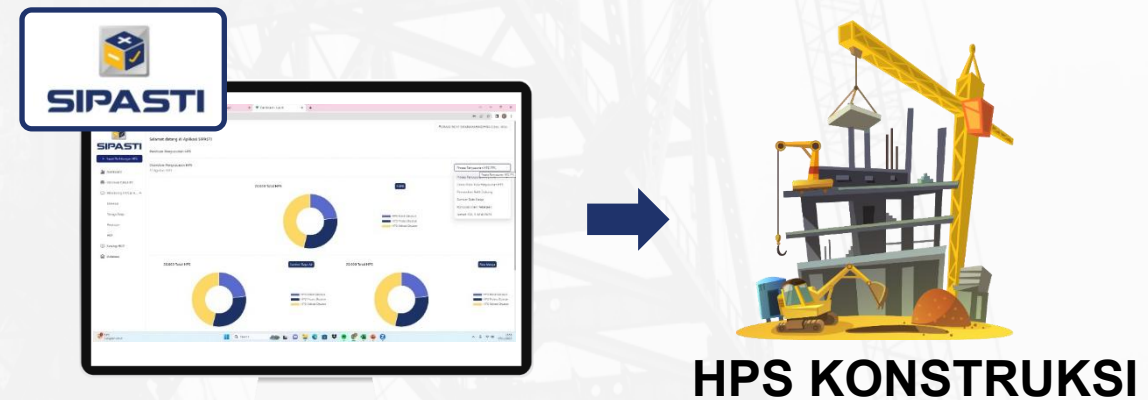
Competitif sesuai
mekanisme pasar

• Penyempurnaan platform katalog V.6

• Digitalisasi Proses Bisnis Sertifikasi TKDN



• Implementasi SIPASTI untuk penyusunan HPS pekerjaan konstruksi



Aksi Pengadaan Barang dan Jasa Stranas PK 2025-2026

OUTPUT	TARGET	MILESTONE		PELAKSANA AKSI	TAHUN
Peningkatan Kualitas HPS Konstruksi dengan Perluasan Implementasi SIPASTI	4.1 Penyusunan HPS dan PAB Konstruksi APBN dan APBD melalui SIPASTI (Pengembangan SIPASTI DAK & APBD)	4.1.1	Ketersedian data integrasi e-Katalog V.6	- LKPP - Kemen PU	2025
		4.1.2	Pengembangan SIPASTI DAK & APBD	- Kemendagri - Kemen PU	2026
		4.1.3	Integrasi SIPASTI dengan SIPD dan SPSE	- LKPP - Kemendagri - Kemen PU	2026
	4.2 38 Pemda prov mengajukan DAK fisik th. 2025 dan (TBC) Pemkab/kota menyusun HPS konstruksi th. 2026 menggunakan SIPASTI (Pilot Project Penerapan SIPASTI DAK & APBD)	4.2.1	Penerapan SIPASTI DAK & APBD Provinsi	- Kemendagri - Kemen PU	2025
		4.2.2	Penerapan SIPASTI APBD Kab/Kota	38 Pemda Provinsi - Pemkab/Pemkot	2026
	4.3 SIPASTI untuk penyusunan HPP (Pengembangan dan Penerapan SIPASTI HPP PU)	4.3.1	Pengembangan SIPASTI HPP	Kemen PU	2025
		-	Penerapan SIPASTI HPP		2025

Keterangan:

Melibatkan Pemda

DUKUNGAN PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SIPASTI OLEH STRANAS PK

KOMISI PEMERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 6424/GAH.00/01-10/11/2021
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi pada Kementerian PUPR RI

30 November 2021

Yth. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta

Sepanjang Tahun 2020 hingga Maret 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi RI mencatat terdapat 36 (tiga puluh enam) kasus terkait infrastruktur yang ditangani dengan modus penyuapan, gratifikasi, persekongkolan fee proyek, dan markap Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Selanjutnya, telah disusun Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), yang dimediasi melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018, berisi 12 (dua belas) aksi yang akan dilaksanakan dalam periode Tahun 2021-2022. Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi mengapresiasi atas komitmen tinggi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI yang telah berkolaborasi bersama untuk melaksanakan aksi tersebut.

Salah satu aksi Stranas PK yang didorong untuk dilaksanakan oleh Kementerian PUPR RI untuk tahun 2021-2022 ini adalah membuat Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJK). Sampai dengan Triwulan Tiga pelaksanaan Stranas PK Tahun 2021, Kementerian PUPR RI telah mengembangkan SIJK Terintegrasi, sistem yang terkoneksi yaitu Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi (SIPASTI).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami yakin bahwa sistem yang sedang dibangun dapat memberikan dampak yang besar terhadap penurunan angka penyimpangan dalam penyelenggaraan infrastruktur. Selanjutnya, kami berharap Kementerian PUPR RI dapat mengembangkan layanan sistem menjadi berskala nasional, sehingga tidak hanya dimanfaatkan di tingkat pusat tetapi dapat menjangkau sampai dengan tingkat provinsi dan kabupaten/kota dan mendukung penuh Tim Pengembangan SIPASTI untuk mencapai target Stranas PK tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan
Setim Nasional
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi,
Natu Ghurron
Ketua

Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950
Telp. (62 21) 25578300, Faks. (62 21) 25578333, http://www.kpk.go.id

KOMISI PEMERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : UND/2868/GAH.00/10-11/12/2023
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Penerimaan Penghargaan

07 Desember 2023

Yth. Bapak/Ibu
(Daftar Undangan Terlampir)
di tempat

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54/2018 memiliki mandat untuk merumuskan dan mengawal pelaksanaan aksi strategis nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) agar lebih terfokus, terukur dan berdampak langsung. Pada pelaksanaan Stranas PK 2023-2024 terdapat total 163 instansi pelaksana aksi yang terdiri dari 61 Kementerian/Lembaga (K/L) dan 102 Pemerintah Daerah (Pemda) yang melaksanakan 15 Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024. Di dalam pelaksanaan aksi diatas, Stranas PK didukung dan berkoordinasi dengan Focal Point (FP) dan unit/direktorat teknis yang telah ditetapkan oleh K/L/D Pelaksana Aksi. FP dan unit teknis adalah komponen terpenting untuk berkontribusi dalam pelaksanaan dan monitoring capaian aksi PK.

Dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) maka Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi akan mengadakan acara apresiasi kepada Focal Point dan K/L/D pelaksana aksi yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 13 Desember 2023
Waktu : Pukul 13.00 - 15.00 WIB
Tempat : Istora Senayan Jakarta (Main Venue)

Mengingat pentingnya kegiatan dimaksud, kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu untuk menerima penghargaan dari Stranas PK atas upaya-upayanya melakukan pencegahan korupsi. Koordinasi dan konfirmasi kehadiran dapat menghubungi Sdr. Syahril Sengaji melalui nomor telepon (021) 25578300 ext. 8014/HP 0813-7042-2903 atau alamat e-mail: stranas12@kpk.go.id. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

a.n. Pimpinan
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring
Selaku Koordinator Pelaksana
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi,

Dokumen ini ditandatangani secara digital
Pahala Nainggolan

Tembusan:
Yth. Inspektur KPK

Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta 12950
Telepon (021) 25578300, Faksimile (021) 25578333, (021) 52892456 http://www.kpk.go.id

KOMISI PEMERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/554/GAH.00/10-11/01/2025
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Komitmen keberlanjutan pengembangan dan pemanfaatan SIPASTI

30 Januari 2025

Yth. Sekretaris Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Di Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) khususnya aksi pengadaan barang dan jasa periode tahun 2021-2024, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah berupaya mengatasi permasalahan kualitas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan konstruksi dengan mengembangkan Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi (SIPASTI) sehingga standarisasi penyusunan HPS pekerjaan konstruksi terjadi melalui fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi antara lain:

1. Katalog harga satuan wilayah;
2. Perhitungan harga perkiraan pelaksanaan (HPP);
3. Perhitungan HPS;
4. Pembahasan, penetapan dan review HPS;
5. Monitoring harga satuan dasar (HSD) dan harga satuan pekerjaan (HSP);
6. Basis data HSD dan HSP.

Hingga akhir tahun 2024, Stranas PK mengapresiasi komitmen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam pemanfaatan SIPASTI yang telah dimandatkan untuk penyusunan HPS di lingkup Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan dituangkan dalam Instruksi Menteri sehingga pada akhir tahun 2024 terdapat 1.388 jumlah paket yang disusun dengan 370 paket berstatus selesai (telah review). Berdasarkan hasil evaluasi penggunaan SIPASTI tahun 2024, Stranas PK mendorong pengembangan SIPASTI tahun 2025-2026 untuk memastikan:

1. Pengayaan katalog harga satuan wilayah melalui pemanfaatan data katalog elektronik LKPP;
2. Pemanfaatan aplikasi SIPASTI untuk penyusunan HPS pekerjaan konstruksi pada Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah;
3. Optimalisasi SIPASTI untuk pencegahan kemahalan pada proses penyusunan Harga Perkiraan Perancang.

Oleh karena itu, diharapkan dukungan Saudara untuk kepastian kebijakan, anggaran dan sumber daya manusia khususnya tim pengembang SIPASTI dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk memastikan keberlanjutan pengembangan dan pemanfaatan SIPASTI yang menjadi bagian aksi pengadaan barang dan jasa Stranas PK tahun 2025-2026.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Pimpinan
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring
Selaku Koordinator Pelaksana
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi,

Dokumen ini ditandatangani secara digital
Pahala Nainggolan

Tembusan:
1. Menteri Pekerjaan Umum RI;
2. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PU RI;
3. Inspektur KPK RI.

Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta 12950
Telepon (021) 25578300, Faksimile (021) 25578333, (021) 52892456 http://www.kpk.go.id

KOMISI PEMERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/1238/GAH/10-16/02/2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pelaksanaan Aksi Pengadaan Barang dan Jasa Stranas PK 2025-2026

21 Februari 2025

Yth. 1. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI
Di tempat

Sehubungan dengan telah diluncurkannya aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Tahun 2025-2026 dengan penandatanganan SKB 5 Tim Nasional Stranas PK pada tanggal 12 Februari 2025. Perlu disampaikan bahwa peningkatan upaya pencegahan korupsi pada pengadaan barang dan jasa (PBJ) masih menjadi aksi yang dilanjutkan. Salah satu targetnya adalah peningkatan kualitas hps konstruksi melalui perluasan penggunaan SIPASTI.

Oleh karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum diharapkan berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan pengembangan dan pemanfaatan SIPASTI terutama untuk penggunaan oleh Pemerintah Daerah. Bersama ini kami lampirkan *logframe* aksi pengadaan barang dan jasa terkait SIPASTI periode tahun 2025-2026.

Untuk keterangan dan informasi lebih lanjut Saudara dapat menghubungi Sdr. Ramdhana Desriyan (0812-2360-7092, stranas46@kpk.go.id). Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Pimpinan
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring
Selaku Koordinator Pelaksana
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi,

Dokumen ini ditandatangani secara digital
Pahala Nainggolan

Tembusan:
1. Menteri Pekerjaan Umum RI;
2. Inspektur KPK.

Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta 12950
Telepon (021) 25578300, Faksimile (021) 25578333, (021) 52892456 http://www.kpk.go.id

2021 - 2022

- KPK sudah mengawal dari tahun 2021 terhadap Inisiasi Kementerian PU atas pembangunan SIPASTI
- Aksi Stranas PK 2021 - 2022

2023 - 2024

- Aksi Stranas PK 2023 - 2024
- Penghargaan HAKORDIA untuk SIPASTI

2025 - 2026

- Apresiasi pengembangan & pemanfaatan SIPASTI PU
- Komitmen keberlanjutan SIPASTI

- Aksi Stranas PK 2025 – 2026
- Peningkatan Kualitas HPS Konstruksi dengan Perluasan Implementasi SIPASTI

2

PENGEMBANGAN SIPASTI

Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi



PENYUSUNAN DAN PENETAPAN HPS

TUJUAN HPS



Menilai kewajaran harga penawaran dan kewajaran harga satuan



Menetapkan batas tertinggi penawaran B/PK/JL



Menetapkan besaran jaminan pelaksanaan

4 PRINSIP HPS



Reliable: (dapat diandalkan) berdasarkan data yang valid untuk memastikan estimasi dapat dipercaya



Akuntabel: Proses penyusunan estimasi harus dapat dipertanggungjawabkan dengan Proses estimasi didokumentasi dengan baik dan jelas.



Auditable: (dapat diaudit) pemeriksaan yang dapat menilai keakuratan dan transparansi proses estimasi



Berintegritas: penyusunan HPS tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau faktor eksternal

REGULASI

1

Perhitungan AHSP, Pengumpulan Data Harga Satuan, Pengajuan AHSP Baru: Permen PUPR 08/2023 dan SE Dirjen BK 30/2025

2

Penggunaan Harga Pasar: SE Menteri PUPR 21/2023, Surat Menteri PUPR No PA 0106-Mn/233 penerapan harga pasar, dan Surat DJBK PA 0106-Dk/334 pelaksanaan penerapan harga pasar

3

Proses Pembahasan HPS: SE Menteri PUPR 21/2023 mekanisme pembahasan usulan HPS

4

Reviu HPS: SOP Tata Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) No 12/SOP.04/2024 oleh Pokja dan Tim Pelaksana

Latar Belakang

CNN Indonesia
<https://www.cnnindonesia.com> · [Translate this page](#)

Objek Korupsi Rumah Dinas Anggota DPR: Kamar Tidur ...

27 Feb 2024 — Pengadaan yang dimaksud yakni Kelengkapan Sarana RJA DPR Ulujami dengan harga perkiraan sendiri (HPS) Rp10 miliar; Pengadaan Kelengkapan Sarana ...

ANTARA News
<https://www.antaranews.com> · [Translate this page](#)

KPK: 90 persen korupsi terkait pengadaan barang dan jasa

6 Mar 2024 — "Perkara **korupsi** pada persidangan, hampir **90** persen menyangkut barang dan jasa. ... Berdasarkan data KPK, hingga 10 Januari 2024, **KPK** telah ...

TEMPO.co
<https://metro.tempo.co> · [Translate this page](#)

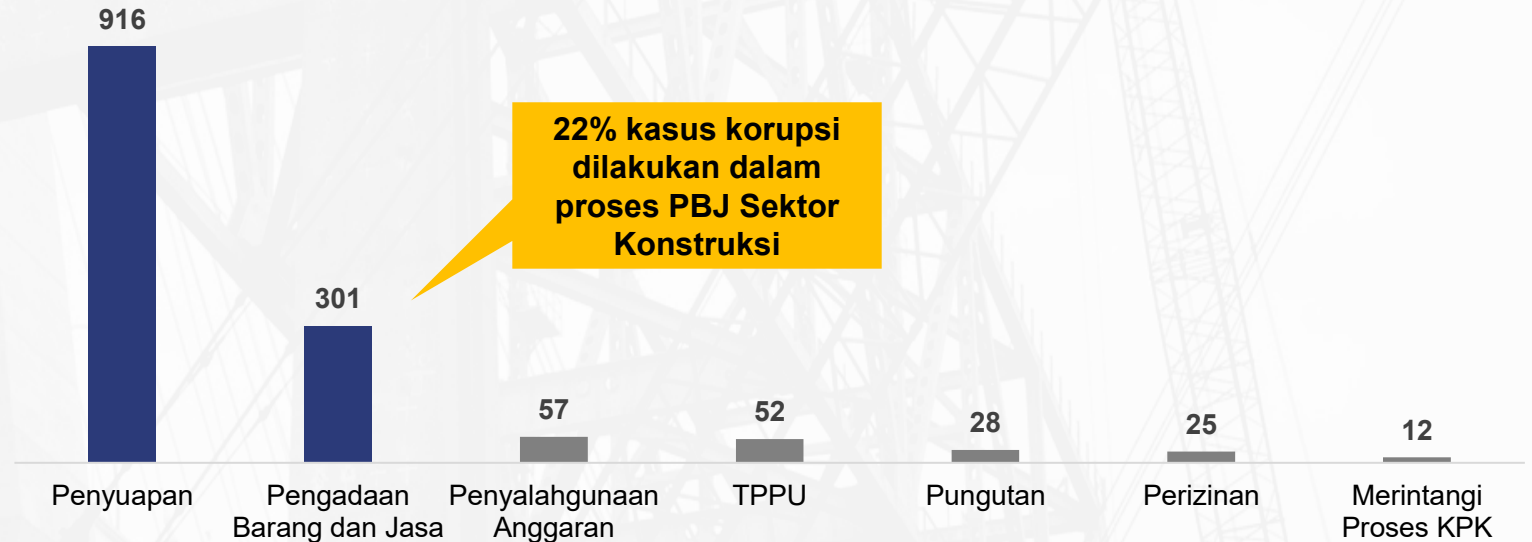
Dugaan Korupsi Rumah Dinas DPR, FITRA Minta KPK ... - Metro

12 Mar 2024 — Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan ada mark up harga dalam kasus dugaan **korupsi** rumah dinas DPR RI pada tahun anggaran 2020.

OTT KPK di Kalimantan Selatan, 4 Pejabat PUPR Terjerat ...

YouTube · Liputan6
3 weeks ago

Jumlah Kasus Korupsi Indonesia*



TAHAPAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKTOR KONSTRUKSI

PERENCANAAN
PENGADAAN

PERSIAPAN PENGADAAN

PERSIAPAN PEMILIHAN

PELAKSANAAN PEMILIHAN

PELAKSANAAN KONTRAK

PENYUSUNAN HPP

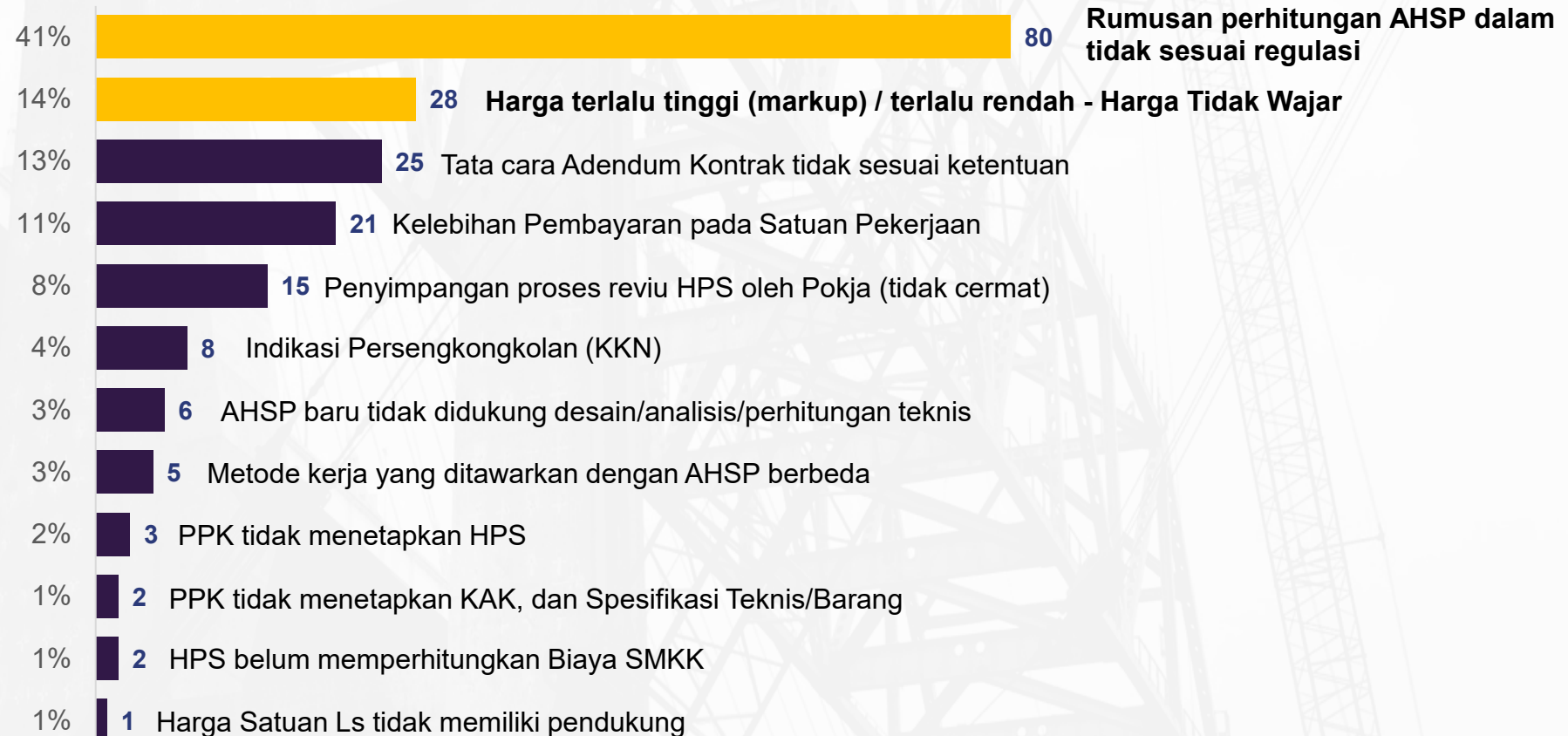
PENYUSUNAN HPS

PENAWARAN

KONTRAK

Latar Belakang

Permasalahan Biaya Pekerjaan Konstruksi



ISU STRATEGIS

1

Harga Satuan Pokok tidak akuntabel

2

Penyusunan Perkiraan Biaya
Pekerjaan Konstruksi tidak sesuai
ketentuan regulasi

3

Proses Pembahasan dan Reviu tidak
efektif & efisien

Direct Cause

Intervention/Solution

Potensi Kemahalan Biaya Pekerjaan
Konstruksi

Potensi Terjadinya
Penyimpangan/KKN dalam PBJ

Direct Problem

SIPASTI

SISTEM INFORMASI PERKIRAAN BIAYA
PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI

bertujuan:

Mencegah penyimpangan dalam PBJ dan mencegah kemahalan
biaya pekerjaan konstruksi akibat tidak tertib regulasi

Note:

*Penyebab Utama Direct Cause dan Direct
Problem Adalah faktor SDM*

ISU STRATEGIS

1 HARGA SATUAN POKOK TIDAK AKUNTABEL

Faktor Penyebab:

1. Data yang dipakai tidak berkualitas
2. Pelaksanaan Survei Belum Optimal
3. Belum terintegrasi dengan sistem informasi lainnya

2 PERHITUNGAN HPS TIDAK SESUAI KETENTUAN REGULASI

Faktor Penyebab:

1. Perhitungan AHSP tidak sesuai Pedoman perhitungan AHSP.
2. Terdapat Perhitungan AHSP belum tersedia dalam pedoman.
3. Rumusan perhitungan dan ketentuan permen dapat dimodifikasi dengan *tools* perhitungan AHSP eksisting.

3 PROSES PEMBAHASAN DAN REVIU HPS TIDAK EFEKTIF & EFISIEN

Faktor Penyebab:

1. Bisnis proses pembahasan & reviu tidak seluruhnya efisien.
2. Pembahasan dan reviu substansi tidak seluruhnya efektif.
3. Pembahasan dan reviu dilakukan secara manual.

KEBIJAKAN DAN DUKUNGAN PENERAPAN SIPASTI

1. KEBIJAKAN PENERAPAN:

Penyusunan HPP oleh Perancang melalui SIPASTI dimulai dari tahapan perencanaan pengadaan

Pengusulan AHSP Baru dimulai dari tahapan perencanaan pengadaan

Penyusunan HPS oleh PPK melalui SIPASTI dimulai dari tahapan persiapan pengadaan

Menggunakan harga satuan yang bersumber dari harga pasar dalam penyusunan HPP dan HPS

Menyiapkan kelengkapan dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam proses penyusunan HPP dan HPS

2. DUKUNGAN PENERAPAN:

Memutakhirkan dan memperbanyak tipologi (paket/lingkup kegiatan/ASMET) pekerjaan

Memanfaatkan manual book, video tutorial, dan layanan bantuan (Tim Reaksi Cepat)

Mengikuti Klinik Daring atau menyelenggarakan *workshop* secara mandiri

Memantau dan Memastikan Penerapan SIPASTI pada setiap tahapan

5 Fitur & Manfaat Utama SIPASTI

1



HARGA SATUAN POKOK WILAYAH (HSPW)

- ✓ Akuntabilitas & realibilitas harga satuan
- ✓ Mengutamakan harga pasar

2



PENYUSUNAN PERKIRAAN BIAYA PEKERJAAN KONSTRUKSI

- ✓ Jaminan kesesuaian rumusan perhitungan dengan regulasi
- ✓ Jaminan kesesuaian ketentuan perhitungan dengan regulasi
- ✓ Tersedia 4094 rincian AHSP sesuai regulasi

3



PEMBAHASAN, PENETAPAN & REVIU

- ✓ *Quality Assurance* kualitas HPS
- ✓ *Quality Control* kualitas HPS
- ✓ Standardisasi proses pembahasan, penetapan, & reviu efektif dan efisien

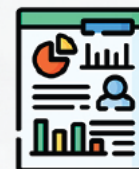
4



MONITORING

- ✓ *Early Warning System*
- ✓ Mekanisme *screening* harga

5



DATABASE

- ✓ *Sharing data & knowledge*
- ✓ Integrasi sistem

TERIMA KASIH